

**PERAN PEMUDA RELAWAN DEMOKRASI DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH  
(STUDI PADA RELAWAN DEMOKRASI BANYUMAS, JAWA TENGAH)**

*Zamzam Muhammad Fuad*  
Universitas Gadjah Mada  
Program Studi Ketahanan Nasional  
Email: milikbersamasaja@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research was going to described the role of Banyumas Democracy Volunteer (Relawan Demokrasi Banyumas) in increasing political public participation in Banyumas's legislative election 2014 and its implication to Banyumas's political resilience.*

*This research used qualitative research design as a research method. Data were collected by in depth review, observation and documentation. This research used purposive sampling technique with stakeholder sampling variant to pick informants.*

*The research showed that Banyumas Democracy Volunteer had a positive role in developing political resilience in Banyumas. Their role was gave political education and election education to voters in Banyumas. In the other words, Banyumas Democracy Volunteer had a vital role in developing ideal political resilience in Banyumas.*

**Keywords:** *Banyumas Democracy Volunteer, Democracy, Election, Political Resilience of Region.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, kendala dan upaya Relawan Demokrasi Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Banyumas dan implikasinya terhadap ketahanan politik Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan yang dipakai adalah teknik *purposive sampling* dengan varian *stakeholder sampling*.

Dari penelitian ini diketahui, peran Relawan Demokrasi Banyumas yaitu sebagai agen pendidikan politik dan agen pendidikan pemilu. Relawan Demokrasi Banyumas juga memiliki fungsi vital dalam membangun ketahanan politik di Banyumas. Hal ini ditunjukkan Relawan Demokrasi manakala berperan sebagai agen pendidikan politik dan pendidikan pemilu. Dengan kata lain, Relawan Demokrasi Banyumas memiliki peran positif dalam mewujudkan ketahanan politik yang tangguh di Banyumas.

**Kata Kunci:** *Relawan Demokrasi Banyumas, Demokrasi, Pemilu, Ketahanan Politik Wilayah*

## **PENGANTAR**

### **Latar Belakang**

Di Indonesia, demokrasi sering dimaknai secara prosedural yaitu keberhasilan mengadakan pemilu. Namun, di Indonesia, fenomena tidak memilih secara benar (golongan putih atau golput) justru semakin menjadi tren. Untuk mengantisipasi jumlah golput yang semakin banyak pada Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan program bernama “Relawan Demokrasi” (Marbun, 2014). Program ini diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas (selanjutnya disebut Banyumas) yang dinamakan dengan Relawan Demokrasi Banyumas.

Sesuatu yang perlu jadi perhatian khusus ialah bahwa keseluruhan anggota Relawan Demokrasi di Banyumas adalah pemuda. Padahal, kaum muda adalah penyumbang besar meningkatnya angka golput di Indonesia. Lalu menjadi pertanyaan, apakah di tengah tren pemuda yang memilih golput, para pemuda yang tergabung dalam Relawan Demokrasi Banyumas dapat berperan secara maksimal dalam mengembangkan demokrasi dan pada gilirannya menciptakan ketahanan politik di Banyumas.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, *pertama*, apa dan bagaimana peran, kendala, dan upaya Relawan Demokrasi Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Banyumas pada Pemilu Legislatif 2014. *Kedua*, apa dan bagaimana implikasi Relawan Demokrasi Banyumas terhadap ketahanan politik wilayah di Banyumas?

Tulisan ini tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran, kendala, dan upaya Relawan Demokrasi Banyumas dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Banyumas pada Pemilu Legislatif 2014. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi Relawan Demokrasi Banyumas terhadap ketahanan politik wilayah di Banyumas.

Demi mencapai tujuan-tujuannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang mengambil dan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan dokumen dari orang-orang dan perilaku orang yang ingin diamati (Moleong, 1993: 3) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah karena tempat itu merupakan kabupaten yang memiliki tren angka golput cenderung meningkat. Dalam Pilkada Banyumas 2013 lalu, dari jumlah DPT sebanyak 1.315.267 orang, hanya 871.926 orang saja yang datang dan mencoblos di tempat pemungutan suara. Sedangkan 443.341 orang tidak datang (Sigit, 2013) Penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* dengan varian *stakeholder sampling*. Menurut Ted Palys, (2008: 697-698) *stakeholder sampling* adalah strategi yang mana peneliti dituntut untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik itu yang membuat, memberi, menjalankan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik. Pertama, teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), baik itu perseorangan ataupun berkelompok (*focus group discussion*). Kedua, observasi. Ketiga, pengumpulan dokumen-dokumen yang mendukung dan dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam melakukan analisis data, gagasan dari Miles dan Huberman (1992:16) sangat

membantu. Menurut mereka, analisis data mencakup 3 macam alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penyampaian kesimpulan. Dengan reduksi data berarti data-data yang didapat kemudian dikelompokkan, dikategorisasikan, dikoding, diabstrakkan, dibuat polanya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Proses ini tentu saja melibatkan interpretasi-interpretasi sang peneliti dalam mencerap data.

Sebagai instrumen untuk memeriksa validitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan. Semua data yang diperoleh oleh peneliti selalu dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian juga data observasi yang dilakukan peneliti juga selalu dikomparasikan dengan data hasil wawancara. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini, setiap data yang diperoleh sebisa mungkin didiskusikan dengan landasan teori informan-informan.

Penelitian ini juga harus mencari landasan teori yang tepat agar tujuan penelitian terpenuhi. Landasan teori diarahkan untuk memeriksa bangunan wacana yang melingkupi tema penelitian ini. Bangunan wacana yang dimaksud adalah teori-teori, pendapat-pendapat, gagasan-gagasan yang teruji secara ilmiah, yang memungkinkan topik dan permasalahan penelitian dapat dipahami. Adapun wacana yang dimaksud tersebut adalah tentang, *pertama*, peran kaum muda dalam wacana politik Indonesia. Menurut Edy Suhardono (1994:3) “peran” adalah fungsi yang dibawakan seseorang atau kelompok ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Kedua, tentang demokrasi, partisipasi politik dan pemilu. Kedaulatan rakyat merupakan kunci demokrasi, sehingga, partisipasi rakyat dalam politik adalah sesuatu

yang mutlak dibutuhkan. Menurut Huntington (dalam Budiardjo, 1981: 2) partisipasi adalah “kegiatan warganegara sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.” Dalam konteks demokrasi Indonesia, pemilu menjadi perhatian khusus. Lewat mekanisme pemilu, masyarakat diperkenankan untuk mengusulkan orang untuk menjadi wakilnya, mengusulkan diri untuk mewakili orang lain, dan memilih seorang wakil untuk mewakili dirinya di parlemen.

Ketiga, teori tentang perilaku pemilih. Bismar Arianto (2011: 53) menjelaskan bahwa perilaku pemilih dalam pemilu dapat dibagi menjadi 2 yaitu perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*no voting behavior*).

Keempat, teori tentang ketahanan nasional dan ketahanan politik wilayah. Secara definitif, ketahanan politik wilayah adalah sebuah konsep sekaligus kondisi politik yang ideal di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya pemerintahan yang demokratis, berdasarkan *recht* atau hukum, pemerintahannya tidak tak terbatas, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat 3 penelitian yang membahas tentang peran organisasi dan atau elite politik dalam proses demokratisasi dan partisipasi politik. Tiga penelitian tersebut adalah 1) “Elite di Sulawesi Selatan: Studi Tentang Peranan Elite Lokal Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat” oleh Irwan Waris; 2) “Peran Politik Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dalam Pemilu 2004: Penelitian di Kabupaten Sleman” oleh Aji Wibowo; 3) “Peran Elit Politik Dalam Konflik Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Implikasinya

Terhadap Ketahanan Wilayah: Studi di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulteng oleh Samsul Bahri. Dari tinjauan tiga penelitian di atas, dapat ditemukan satu benang merah bahwa demokratisasi tak akan bisa dilakukan tanpa partisipasi politik masyarakat yang kuat.

## **PEMBAHASAN**

Kabupaten Banyumas (selanjutnya akan ditulis Banyumas) merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Banyumas terletak pada garis Bujur Timur 108° 39' 17" sampai 109° 27' 15" dan pada garis Lintang Selatan 7° 15' 05" sampai 7° 37' 10" (BPS Banyumas, 2013:1-2). Banyumas dibagi dalam 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Ibukota Banyumas ialah Purwokerto. Purwokerto merupakan pusat administrasi sekaligus pusat ekonomi di Banyumas (BPS Banyumas, 2013:1-2).

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah total 1.603.037. Dengan luas wilayah 1.328 dan penduduk berjumlah 1.603.037, maka tingkat kepadatan penduduk Banyumas cukup tinggi yaitu 1.207 orang perkilometer persegi. Indeks Pembangunan Manusia di Banyumas cukup rendah (BPS Jawa Tengah, 2011:98). Ini karena banyak dari mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan. (BPS Jawa Tengah, 2011:63).

Jumlah pemuda di Banyumas adalah 352,261 orang. Namun demikian, Karang Taruna Banyumas belum bisa menjadi mesin kaderisasi pemuda yang efektif di Banyumas. Organisasi kepemudaan yang aktif berada di kampus-kampus di Banyumas yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan organisasi ekstra kampus seperti HMI, IMM, FMN, GMNI, PMKRI, PMII.

Dalam hal kehidupan agama, seskipun keberadaan agama di Banyumas cukup heterogen, namun tingkat toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat beragama di Banyumas relatif tinggi. Namun penganut agama yang menganut keyakinan radikalisme dan anti demokrasi juga perlu diwaspadai karena pertumbuhannya cukup masif.

Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat Banyumas lebih banyak perempuan. Akan tetapi tingkat kesejahteraan, pemenuhan ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan perempuan ternyata tidak lebih baik daripada laki-laki. Buktinya IPG Banyumas termasuk dalam kategori di bawah rata-rata, yaitu 64,65.

Banyumas juga memiliki jumlah kaum difabel yang banyak. Total jumlah kaum difabel di Banyumas ialah 6180. Angka yang tinggi ini rupanya belum diantisipasi dengan pemerataan hak-hak politik bagi kaum difabel. Selain kaum difabel, kaum marginal di Banyumas jumlahnya juga banyak. Namun tidak diiringi dengan pemberdayaan terhadap kaum marginal. Jika dilihat dari jumlahnya masalah sosial di Banyumas ini adalah yang tertinggi kelima di seluruh Jawa Tengah. Di atas segalanya, itulah latar di mana Relawan Demokrasi Banyumas eksis.

Sementara itu, Relawan Demokrasi Banyumas merupakan gerakan sosial yang berisi perwakilan dari elemen masyarakat berusia 17-25 tahun yang bersifat non-partisan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas warga negara, yang terdaftar sebagai pemilih, dalam Pemilu 2014 (KPU, 2013:1).

Tujuan dibentuknya Relawan Demokrasi Banyumas adalah 1) meningkatkan kualitas proses pemilu. 2) meningkatkan partisipasi

pemilih. 3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 4) Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Sementara itu, tugasnya ada enam. 1) memetakan varian kelompok sasaran. 2) mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran. 3) mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan. 4) menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain. 5) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. 6) menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Banyumas.

Ruang lingkup kerja Relawan Demokrasi Banyumas adalah memberikan pendidikan politik dan pemilu pada lima kelompok sasaran yaitu kelompok pemilih pemula, perempuan, marginal, agama dan difabel. Kaum muda menjadi sasaran rekrutmen KPUD Banyumas untuk menjadi anggota Relawan Demokrasi. Pada awalnya, proses penjaringan hanya membutuhkan sebanyak 15 orang. Lantaran lebih baik dalam hal wacana politik, aktivis organisasi mahasiswa ekstra kampus lebih banyak yang direkrut.

Seluruh anggota Relawan Demokrasi dikoordinir oleh satu orang yang ditunjuk oleh KPUD Banyumas. Tugasnya, membuat materi sosialisasi dan melakukan fungsi koordinasi antar anggota Relawan Demokrasi Banyumas dan antara KPUD Banyumas dan Relawan Demokrasi Banyumas.

Relawan Demokrasi Banyumas tidak eksis di ruang hampa, melainkan diciptakan untuk menanggapi persoalan-persoalan politik. Hidup di tengah-tengah atmosfer politik tertentu menuntun dan menuntut Relawan Demokrasi Banyumas mengambil tindakan-tindakan tertentu. Oleh karenanya,

untuk memahami peran Relawan Demokrasi Banyumas membutuhkan analisa terhadap lanskap politik dan pemilu di Banyumas.

Dalam catatan Bappenas, jantung persoalan demokrasi di Banyumas sebenarnya adalah pada 1) membangun kesadaran berpolitik masyarakat, 2) merevitalisasi infrastruktur politik pemerintahan dan demokrasi agar lebih peka terhadap kepentingan masyarakat.

Selain itu, politik di Banyumas juga ditandai dengan elitisme dan disfungsi infrastruktur demokrasi sehingga aspirasi rakyat kurang terartikulasikan. Hal ini menyebabkan warga Banyumas semakin apatis terhadap proses-proses politik di Banyumas termasuk pemilu (Chusmeru dan Santoso, 2012:5). Bisa dipahami mengapa sejak reformasi, angka golput semakin meningkat.

Relawan Demokrasi Banyumas muncul sebagai lembaga yang dari awal memang sengaja dipersiapkan untuk membangun kesadaran masyarakat Banyumas tentang politik yang demokratis. Dilihat dari perannya, relawan demokrasi berperan sebagai agen pendidikan politik dan pendidikan pemilu.

Dalam hal peran sebagai agen pendidikan politik, Relawan Demokrasi Banyumas memberikan pemahaman tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia. Hampir semua bidang dalam Relawan Demokrasi Banyumas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai apa itu demokrasi. Dalam materi-materi sosialisasi yang disampaikan, Relawan Demokrasi Banyumas menjelaskan bahwa sistem politik demokrasi memiliki 2 macam ciri utama. Pertama, sistem politik yang meletakkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedua, adanya keterbukaan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan

aspirasinya kepada negara. Dari definisi ini, nampak jelas bahwa Relawan Demokrasi Banyumas hendak menyuntikkan kesadaran pada masyarakat bahwa menjadi warga negara yang baik ialah warga negara yang mampu berpartisipasi dalam politik dengan baik.

Relawan demokrasi juga berperan sebagai agen yang memberikan pemahaman tentang relasi agama dan demokrasi. Sebagaimana dikatakan oleh Pamungkas, golput juga merupakan fenomena teologis. Artinya, memang ada pihak tertentu yang memiliki pemahaman bahwa mengambil pilihan untuk golput merupakan sesuatu yang dikehendaki agama (Pamungkas, 2011: 92). Mengingat ini semua, Relawan Demokrasi Banyumas memberikan porsi sosialisasi yang serius di bidang kelompok agama. Menurut Bagus, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kultur masyarakat Banyumas masih kental dengan nuansa religius. Maka salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pemilu di Banyumas adalah masuk ke dalam kelompok agama sekaligus mengajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pembangunan politik yang demokratis dan melakukan sosialisasi pemilu (Wawancara Bagus Irmawansyah, anggota Relawan Demokrasi Banyumas bidang kelompok agama, 15 Juni 2014, 13:28 WIB).

Relawan Demokrasi Banyumas juga berperan sebagai agen yang memberikan pemahaman tentang partisipasi perempuan dan demokrasi. Ini penting sebab, di seluruh Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Banyumas termasuk dalam kategori di bawah rata-rata, yaitu 64,65. Ini berarti di Banyumas, kaum laki-laki masih unggul dalam hal pendapatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan daripada perempuan. Dampaknya,

sejak pemilu 1999 hingga 2009, tingkat partisipasi kaum perempuan di Banyumas dalam pemilu adalah termasuk dalam kategori rendah. Padahal, jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap, kaum perempuan lebih dominan jumlahnya daripada kaum laki-laki.

Pengarusutamaan keadilan gender dalam politik dan pemilu merupakan agenda utama Relawan Demokrasi Banyumas. Salah satu pusat ketidakadilan gender adalah ketiadaan kesempatan bagi perempuan untuk duduk di ruang publik. Oleh karena itulah pemilu sangat tepat bagi kaum perempuan untuk mencapai tujuan keadilan gender. Dalam materi pemaparan sosialisasi disampaikan bahwa selama ini, perempuan menjadi kelompok yang tidak mendapatkan pendidikan politik yang baik. Ada hambatan kultural bahkan yang bernada agama yang menghendaki perempuan hanya boleh mengurus persoalan domestik keluarga, bukan publik. Relawan Demokrasi Banyumas meyakinkan kelompok perempuan untuk meyakini bahwa keberhasilan menempatkan representasi perempuan di parlemen sedikit banyak akan mengubah nasib mereka.

Relawan Demokrasi Banyumas juga berperan sebagai agen yang memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang dalam pemilu. politik uang dan jual beli suara semakin mengalami pendalaman dan perluasan di Banyumas (Wawancara dengan Gunawan, Ketua Panwaslu Banyumas, 15 Juni 2014, 22:23).

Ada beberapa hal terkait fenomena politik uang yang disampaikan oleh Relawan Demokrasi Banyumas terhadap masyarakat. *Pertama* ialah hubungan antara politik uang dan pemilu. Dalam hal ini, para anggota relawan demokrasi meyakini bahwa siapapun

yang memenangi pemilu menggunakan cara-cara licik seperti membagi-bagikan uang atau amplop tidak akan menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat. Pemimpin yang seperti ini akan berupaya sekuat tenaga untuk mencari ganti laba (bukan ganti rugi) atas uang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Sumber keuangan untuk menambal kerugian di masa kampanye tidak lain adalah uang hasil korupsi atau penggelepan. Oleh karena itu salah cara memutus rantai korupsi adalah meyakinkan diri sendiri untuk menolak praktik politik uang.

*Kedua*, relawan Demokrasi Banyumas menerangkan tentang modus politik uang yang kemungkinan akan terjadi pada masa kampanye pemilu. Dalam materi sosialisasinya Relawan Demokrasi Banyumas menjelaskan bahwa modus politik uang tidak lagi dalam bentuk penyebaran uang cash dalam amplop. Sekarang modusnya lebih canggih. Sasarannya masyarakat atau kelompok, bukan individu. Misalnya ada seseorang calon anggota legislatif yang memberikan sumbangan semen untuk pembangunan masjid atau perbaikan jalan. Ada juga yang dimungkinkan memberikan alat kebutuhan rumah tangga pada ibu-ibu di forum-forum pertemuan. Dan masih banyak lainnya. Modus-modus politik uang seperti inilah yang disampaikan oleh Relawan Demokrasi Banyumas pada masyarakat.

Sementara itu, sebagai agen pendidikan pemilu, Relawan Demokrasi Banyumas memberikan sosialisasi tentang tahapan pemilu. sosialisasi tahapan pemilu tidak diarahkan untuk meningkatkan jumlah suara dalam pemilu. Namun hal ini dilakukan hanya untuk membentuk masyarakat yang peka pemilu atau masyarakat yang mengerti kapan

tanggal pelaksanaan pemilu, kapan tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan tahap penetapan suara.

Selain itu, sosialisasi tahapan juga dilakukan untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi proses-proses kampanye. Kenyataannya, masih banyak tim pemenangan calon legislatif tertentu yang masih berkampanye sekalipun masa kampanye sudah dinyatakan berakhir. Kasus demikian itu masih sering terjadi di Banyumas. Misalnya seperti pemasangan poster, baliho, pamflet bergambar calon anggota legislatif. Fenomena seperti ini bisa terjadi lantaran beberapa hal misalnya karena memang tim sukses yang dengan sengaja atau tidak tau mengenai peraturan tentang pemasangan atribut kampanye. Bisa juga karena kurang efektifnya kerja dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Namun selain itu juga bisa saja karena kontrol dari masyarakat yang kurang terhadap kecurangan-kecurangan seperti ini.

Relawan Demokrasi Banyumas juga berperan sebagai agen yang mensosialisasikan mekanisme pemilihan. Pada Pemilu 2009, teknik menggunakan hak suara dalam pemilu adalah dengan mencontreng kertas suara menggunakan alat tulis tertentu. Sementara itu pada Pemilu 2014, berganti dengan teknik mencoblos. Kalau perubahan ini tidak disosialisasikan sejak awal maka akan terjadi kekacauan informasi di masyarakat yang pada gilirannya berpotensi menjadi penyebab kesalahan dalam memberikan hak suara di TPS. Tanpa sosialisasi yang masif, perubahan teknik pencoblosan ini menjadi persoalan krusial mengingat dalam pemilu 2014 akan lebih rumit sebab terdapat banyak sekali daftar calon anggota legislatif.

Dalam hal sosialisasi teknis memilih, ada tiga macam informasi yang paling sering disampaikan oleh tim Relawan Demokrasi Banyumas ketika melakukan sosialisasi. Pertama terkait bagian kertas suara yang dicoblos. Kedua, perihal kolom yang harus dicoblos. Ketiga yaitu mekanisme apabila hendak memilih di tempat pemungutan suara yang berlainan dengan yang terdapat dalam surat undangan pemilihan.

*Ketiga*, Relawan Demokrasi Banyumas berperan sebagai agen yang memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap. KPU Banyumas seringkali mendapat pengaduan dari masyarakat tentang persoalan Daftar Pemilih Tetap, seperti daftar nama pemilih yang ganda, daftar pemilih yang sudah meninggal, daftar pemilih yang sudah tidak ada di lokasi. Menghadapi persoalan ini, KPU Banyumas meminta tolong kepada Relawan Demokrasi Banyumas untuk melakukan pengecekan terhadap aduan yang masuk ke KPU Banyumas khususnya terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap.

Pranita menjelaskan bahwa tugas ini bukanlah tugas utama Relawan Demokrasi Banyumas. akan tetapi tidak jarang pihak KPU Banyumas berpesan agar melakukan pengecekan ulang. Relawan Demokrasi Banyumas bidang perempuan merupakan yang paling sering melakukan pengecekan ulang Daftar Pemilih Tetap. Hal ini lantaran pemilih yang meninggalkan tempat asalnya didominasi oleh kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi perantau untuk bekerja di kota-kota besar. (Wawancara Pranita Nur Khasanah, koordinator Relawan Demokrasi Banyumas bidang perempuan, 18 Juni 2014, 11:42 WIB). Tidak jarang juga KPU Banyumas meminta relawan demokrasi untuk melakukan pengecekan ulang atas aduan

adanya daftar ganda (terdaftar di satu TPS, namun juga terdaftar di TPS lain dalam waktu bersamaan)

Dalam menjalankan perannya, terdapat 7 macam kendala yang paling sering dirasakan oleh para anggota Relawan Demokrasi Banyumas. 1) kode etik yang mengatur tentang netralitas anggota relawan demokrasi. 2) waktu persiapan dan pelatihan yang sangat minimal. 3) terlambatnya distribusi kartu identitas keanggotaan relawan demokrasi dan sedikitnya media sosialisasi. 4) kurangnya jumlah anggota Relawan Demokrasi Banyumas. 5) bentrokan dengan kalender akademis dan kalender pendidikan. 6) apatisme dan sikap tidak simpatik dari objek sosialisasi Relawan Demokrasi Banyumas. 7) tidak bekerjanya mesin partai atau tim sukses calon anggota legislatif untuk ikut mensosialisasikan pemilu.

Dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Banyumas yaitu menambah jumlah anggota dan mengajak tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi pemilu. Setelah memahami peran, kendala dan upaya relawan demokrasi dalam pemilu legislatif 2014, barulah dapat ditarik kesimpulan mengenai implikasi Relawan Demokrasi Banyumas terhadap ketahanan politik Banyumas.

Di Banyumas, hasil pemilu legislatif 2014 menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Banyumas dalam pemilu naik menjadi 71%. Relawan Demokrasi Banyumas berhasil dalam meluaskan kesadaran warga mengenai hak-hak politiknya. Penelitian ini mengungkap bahwa Relawan Demokrasi Banyumas berhasil dalam memberikan pendidikan politik dan pemilu pada warga,



khususnya bagi warga yang relatif sulit mendapat arus informasi seperti kaum difabel dan marjinal.

Dengan berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bagaimana implikasi Relawan Demokrasi Banyumas terhadap ketahanan politik wilayah. Namun sebelumnya harus dipaparkan terlebih dahulu konsep besar tentang ketahanan politik. Ketahanan politik wilayah harus memiliki paling tidak dua sifat atau karakteristik, yaitu ketahanan politik wilayah yang ditandai dengan ketangguhan dan ketahanan politik wilayah yang ditandai dengan keuletan. Ketahanan politik wilayah yang tangguh adalah kondisi politik di suatu wilayah yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional, tidak terpecah-pecah, bersatu, tidak berpolar. Sementara itu, ketahanan politik wilayah yang ulet dapat didefinisikan sebagai kondisi politik di suatu wilayah yang memungkinkan terjadinya dukungan, partisipasi dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Ketahanan politik mengandaikan adanya proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Relawan Demokrasi Banyumas di setiap agenda sosialisasinya tidak hanya selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun juga menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Dengan melihat pada usaha Relawan Demokrasi Banyumas dan kaitannya dengan ketahanan politik wilayah maka dapat dikatakan bahwa Relawan Demokrasi Banyumas memiliki implikasi positif dalam membangun ketahanan politik wilayah yang tangguh dan ulet.

## **SIMPULAN**

Tugas pokok Relawan Demokrasi Banyumas dimanifestasikan dengan

memberikan pendidikan politik dan pendidikan pemilu. Dalam dua pokok tugas inilah Relawan Demokrasi Banyumas menunjukkan perannya di masyarakat Banyumas. Terdapat dua peran utama Relawan Demokrasi Banyumas. *Pertama* ialah sebagai agen pendidikan politik bagi masyarakat Banyumas. Dalam menjalankan peran ini, Relawan Demokrasi Banyumas berfungsi untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang beberapa hal yaitu, demokrasi dan pemilu di Indonesia, relasi agama dan demokrasi, partisipasi perempuan dan demokrasi, dan bahaya politik uang dalam pemilu.

*Kedua*, Relawan Demokrasi Banyumas berperan sebagai agen pendidikan pemilu bagi masyarakat Banyumas. Peran ini terlihat ketika Relawan Demokrasi Banyumas memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pelaksanaan pemilu seperti tahapan pemilu, mekanisme pemilihan dan memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa target memberikan pendidikan politik adalah agar warga pemilih di Banyumas mau memberikan suaranya secara cerdas. Sedangkan target memberikan pendidikan pemilu adalah agar pemilih di Banyumas berhasil memberikan suaranya dengan benar, sehingga meminimalisir terjadinya fenomena suara tidak sah ketika pemilu dilangsungkan.

Ada banyak sekali kendala ketika Relawan Demokrasi Banyumas menjalankan perannya. Adapun kendala dimaksud yaitu ialah kode etik netralitas, bentrokan dengan kalender akademis dan kalender pendidikan, waktu persiapan dan pelatihan minimal, terlambatnya distribusi penanda identitas, alat peraga dan media sosialisasi, dan kuantitas anggota Relawan Demokrasi Banyumas yang

terbatas. Sementara itu, kendala eksternal yang muncul ketika Relawan Demokrasi Banyumas menjalankan perannya yaitu adanya masyarakat yang apatis dan tidak simpatik terhadap agenda yang diadakan oleh Relawan Demokrasi Banyumas dan keberadaan partai dan calon legislatif yang absen dalam memberikan sosialisasi pemilu.

Agar peran yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Banyumas dapat mencapai hasil yang diharapkan, dibutuhkan solusi untuk memecahkan berbagai macam kendala yang muncul tersebut. Terdapat dua langkah utama yang diambil oleh Relawan Demokrasi Banyumas. *Pertama*, menambah jumlah anggota Relawan Demokrasi Banyumas sebanyak sepuluh orang. Meskipun hanya sebagai pembantu teknis, sepuluh orang ini dapat mengoptimalkan roda organisasi Relawan Demokrasi Banyumas. *Kedua*, menunjuk tokoh masyarakat sebagai mitra dalam agenda sosialisasi. Dengan adanya tokoh masyarakat sebagai mitra, maka gap yang muncul antara masyarakat dengan Relawan Demokrasi Banyumas dapat dihindarkan.

Peran Relawan Demokrasi Banyumas sebagai agen pendidikan politik dan pendidikan pemilu sangat berkorelasi positif dengan konsep ketahanan politik. Adapun yang dimaksud dengan ketahanan politik ialah konsep sekaligus kondisi politik masyarakat yang dicirikan oleh tumbuh berkembangnya iklim demokrasi dalam masyarakat dan adanya pemilu yang terselenggara secara teratur, cerdas dan LUBERJURDIL. Jika dilihat dari perannya, jelas sekali terlihat bahwa Relawan Demokrasi Banyumas hendak menciptakan pemilu di Banyumas yang luberjurdil dengan kualitas pemilih masyarakat yang cerdas. Dengan demikian dapat dikatakan dengan

tegas bahwa Relawan Demokrasi Banyumas memiliki implikasi positif bagi terwujudnya ketahanan politik wilayah di Banyumas.

Dari kesimpulan di atas, ada 5 rekomendasi yang diajukan di sini. 1) Jika Program Relawan Demokrasi diadakan lagi, maka KPU perlu menambah jumlah anggota, 2) KPU juga perlu menambah waktu persiapan dan pelaksanaan. 3) memaksimalkan sarana dan prasarana 4) KPU perlu menambah jumlah anggota pemuda non-mahasiswa. 5) Pemerintah Daerah Banyumas membuat program kepemudaan yang mengadaptasi program Relawan Demokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianto, B. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 51-60.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas. 2013. *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2013*, Banyumas: BPS Banyumas.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 2011. *Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2011*. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah.
- Budiardjo, M. 1981. Suatu Pengantar. Dalam *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Editor M. Budiardjo. Jakarta: Gramedia.
- Chusmeru dan Santoso, E. 2012. Persepsi Masyarakat Banyumas Tentang Demokrasi. Dalam *Acta diurna*. 8 (1): 1-9.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas. 2013. *Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Kabupaten Banyumas Rekrut Relawan Demokrasi*. Banyumas: KPU Kabupaten Banyumas.

- Marbun, J. 2014. KPU Berharap Relawan Demokrasi Mampu Tekan Golput. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/02/21/n1c8jk-kpu-berharap-relawan-demokrasi-mampu-tekan-golput>. 1 Maret 2014.
- Miles, M. B dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, L. J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Palys, T. 2008. Purposive Sampling. Dalam *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Editor Lisa M. Given. London: Sage.
- Pamungkas, S. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Sigit, A. 2013. Golput Pilkada Banyumas Tinggi. <http://krjogja.com/read/163565/golput-pilkada-Banyumas-tinggi>. 1 Maret 2014.
- Suhardono, E. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara:**
1. Bagus Irmaransyah, 15 Juni 2014, 13:28 WIB
  2. Gumawan, 15 Juni 2014, 22:23 WIB.
  3. Pranita Nur Khasanah 18 Juni 2014, 11:42 WIB.